

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Azwar, Sarifuddin, 1998, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gazali, Djoni S. dan Usman, Rachmadi, 2012, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hadjon, Phillipus M, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya dalam Luthvi Febryka Nola, “Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7, No. 1, Juni 2016.
- Hupkes, Eva, 2005, *Insolvency: Why a Special Regime for Banks?* dalam *Current Development in Monetary and Financial Law*, International, International Monetary Fund (IMF), Washington.
- Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Muljadi, Kartini, 2001, “Actio Pauliana dan Pokok-pokok tentang Pengadilan Niaga”, dalam Rudhy A. Lontoh, et.al, 2001, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Muljadi, Kartini, 2001, *Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan*, dalam Rudhy A. Lontoh, 2001, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Nidar, Sulaeman Rahman, 2016, *Manajemen Keuangan Perusahaan Modern*, Pusat Reka Cipta (PRC), Bandung.
- Noer Azam Achsani, et al., 2006, *Persepsi, Preferensi Dan Perilaku Masyarakat Dan Lembaga Penyedia Jasa Terhadap Sistem Pembayaran Non Tunai*, Bank Indonesia, Jakarta.
- Pramono, Nindyo dan Sularto, 2017, *Hukum Kepailitan dan keadilan Pancasila*, ANDI, Yogyakarta.

- Shubhan, M. Hadi, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Insitut Bankir Indonesia, Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Sugarman, Eli, et.al., 2011, *An Introduction to the Law of Afghanistan*, 3rd Edition, Afghanistan Legal Education Project (ALEP) at Stanford Law School, California.
- Sutedi, Adrian, 2018, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tumbuan, Fred B.G "Ciri-ciri Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagaimana Dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepailitan", dalam "Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", Lontoh, Rudhy A., et.al., Alumni, Bandung.

ARTIKEL JURNAL

- Anindita, Ivan Rifqi, et.al., "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Pembayaran Berbasis Teknologi di Indonesia", *NOTARIUS*, Vol. 13, No. 2, Agustus 2020.
- Anisah, Siti, "Personal *Guarantee* dan *Corporate Guarantee* dalam Putusan Peradilan Niaga", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 9, No. 19, Februari 2002.
- Anisah, Siti "Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditur dan Debitur dalam Hukum Kepailitan", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 16, No. Edisi Khusus, Oktober 2009.
- Campbell, Andrew and Cartwright, Peter, "Deposit Insurance, Consumer Protection, Bank Safety and Moral Hazard," *European Business Law Review*, Vol. 10, No. 3, 1999.
- Candrawati, Ni Nyoman Anita, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu *E-Money* Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 3, No. 1, Maret 2014.
- Cotran, Eugene, "The Development and reform of The Law in Kenya", *Journal of African Law*, Vol. 27, No. 1, Spring 1983.

- Elisabet, Vera dan Roedjino, “Pengertian dan Maksud Utang Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan Penerapannya dalam Putusan Pengadilan”, *Jurnal Sosiosains*, Vol. 17, No. 4, 2004.
- Greenacre, Jonathan and Buckley, Ross, “Using Trusts to Protect Mobile Money Customers”, *Singaporean Journal of Legal Studies*, Juli 2014, hlm. 61. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2612454>.
- Handayani, Tri dan Abubakar, Lastuti “Implikasi Kegiatan Usaha Penitipan dengan Pengelolaan (*Trust*) Dalam Aktivitas Perbankan Terhadap pembaharuan Hukum Perdata Indonesia”, *Jurnal LITIGASI*, Vol. 15, No. 2, Januari 2016.
- Hansmann, Henry and Mattei, Ugo, “The Functions of Trust Law: a Comparative Legal and Economic Analysis”, *New York University Law Review* 5, Vol. 73, No. 434, May 1998.
- Ilman, Abdul Hadi, et al., “Peran Teknologi Finansial Bagi Perekonomian Negara Berkembang, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 4, No. 1, Juli 2019.
- Kemp, Katharine dan Buckley, Ross, “Resolution Powers Over E-Money Providers”, *University of New South Wales Law Journal*, Vol. 40, No. 4, Juli 2017.
- Lintangsari, Nastiti Ninda, “Analisis Pengaruh Instrumen Pembayaran Nontunai Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1, No. 1, April 2018.
- Mamengko, Rudolf Sam, “Pembuktian Unsur Kesalahan Dalam Gugatan Ganti Rugi Oleh Konsumen Terhadap Pelaku Usaha”, *Lex Privatum*, Vol. 4, No. 5, Juni 2016.
- Mintarsih, “Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (E-money) DHubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 29, No. 02, September 2013.
- Nola, Luthvi Febryka, “Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7, No. 1, Juni 2016.
- Noviana, Nina, “Perubahan Pokok Dalam Peraturan kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Jurnal Hukum dan pembangunan*, Vol. 36, No. 2, April-Juni 2006.
- Polinsky, Mitchell dan Shavell, Steven, “The Uneasy Case for Product Liability”, *Harvard Law Review*, Vol. 123, No. 1437, April 2010.
- Ramelan, Yudha, “Perlindungan Terhadap Simpanan Pernah Tercatat Pada Bank, Bukan Suatu Keniscayaan”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 4, Februari 2019.

- Ramos, David, et.al., "Protecting Mobile Money Customer Funds in Civil Law Jurisdiction", *International & Comparative Law Quarterly*, Vol. 65, No. 3, Juli 2016.
- Saputra, Sri Agung Surya, et.al., "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Diberlakukannya Forced Delisting Oleh Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus PT Davomas Abadi Tbk)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, Juni 2016.
- Sularto, "Perlindungan Hukum Kreditur Separatis Dalam Kepailitan", *Mimbar Hukum*, Vol. 24, No. 2., Juni 2012.
- Tarazi, Michael dan Paul Breloff, "Nonbank E-Money Issuers: Regulatory Approaches To Protecting Customer Funds." *Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) Focus Note*, No. 63. CGAP, Juli 2010.
- Tasril, "Analisis Penyaluran Kredit Pada PT Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Sorek Kabupaten Pelalawan", *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14, No. 2, September 2016.
- Tazkiyyaturrohmah, Rifky, "Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern", *Muslim Heritage*, Vol. 3, No. 1, Mei 2018.
- Tsang, e Cheng-Yun, t.al., "Promoting Financial Inclusion by Encouraging the Payment of the Interest On E-Money", *University of New South Wales Law Journal*, Vol. 40, No. 4, Juli 2017.
- Tuela, Marcelo Leonardo, "Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Barang yang Diperdagangkan", *Lex Privatum*, Vol. 2, No. 3, Agustus-Oktober 2014.

HASIL PENELITIAN

- Ari, Rogarani, 2017, *Legal Protection for E-money in Safeguarding Funds: Comparative Study as a Lesson Learned by Indonesia from Luxembourg*, Skripsi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm 23.
- Castri, Simone di, 2013, *Mobile Money: Enabling Regulatory Solutions*, Penelitian, GSMA Association, London.
- Committee on Payment and market Infrastructures (CPMI) and Bank For International Settlements (BIS), 2016, *Payment Aspects of Financial Inclusion*, Penelitian, CMPI dan BIS, Basel.
- Directorate-General for Economic and Financial Affairs, 2012, *Non-bank Financial Institutions: Assessment of Their Impact on the Stability of the Financial System Economic*, Penelitian, European Commission, Brussels.
- Fung, Ben, et.al., 2014, *Electronic Money and Payments: Recent Developments and Issues*, Penelitian (Discussion Paper), No. 2014-2, Bank of Canada, Canada.

- GSMA, 2016, *Safeguarding Mobile Money: How Providers and Regulators Can Ensure that Customer Funds are Protected*, Penelitian, GSMA, London.
- Grossman, Jeremiah, 2016, *Safeguarding Mobile Money: How Providers and Regulators Can Ensure That Customer Funds are Protected*, Penelitian, Bill and Melinda Gates Foundation, Washington.
- Hidayati, Siti, et al., 2006, *Kajian Operasional E-Money*, Penelitian, Bank Indonesia.
- Izaguirre, Juan Carlos, et.al., 2016, *Deposit Insurance and Digital Financial Inclusion*, Penelitian (Policy Brief), Consultative Group to Assist the Poor (CGAP), Washington.
- Izaguirre, Juan Carlos, et.al., 2019, *Deposit Insurance Treatment of E-Money: An Analysis of Policy Choices*, Penelitian (Technical Note), Consultative Group to Assist the Poor (CGAP), Washington.
- Kerse, Mehmet dan Staschen, Stefan, 2018, *Safeguarding Rules for Customer Funds Held by EMIS*, Penelitian, Consultative Group to Assist the Poor (CGAP), Washington.
- Lamb, Jason dan Polverini, Sascha, 2014, *Assessing Risk In Digital Payments (Special Report, Financial Services For The Poor)*, Penelitian, Bill And Melinda Gates Foundation Washington.
- Oliveros, Ross M. dan Pacheco, Lucia, 2016, *Protection Of Customer's Funds In Electronic Money: A Myriad Of Regulatory*, Penelitian Financial Inclusion Watch, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Bilbao.
- Ripaldi, Billy Okva, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik Brizzi Bank BRI*, Skripsi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta.

ARTIKEL MAJALAH

- Martowardojo, Agus D.W., "Memaksimalkan Transaksi Non Tunai, Gerai Info Bank Indonesia" *Gerai Info Bank Indonesia Newsletter*, Edisi 50 Tahun ke-4, 2014.
- Nizar, Muhammad Afdi, "Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep dan Implementasinya di Indonesia", *Warta Fiskal Edisi 5*, 2017.

INTERNET

- Andrea Barry, "How Kenya Created the World's Most Successfull Mobile-Money Services, <https://digital.hbs.edu/platform-rctom/submission/how-kenya-created-the-worlds-most-successful-mobile-payments-service/>, diakses pada 4 Januari 2021.

Afghanistan Deposit Insurance Corporation, “Afghanistan Deposit Insurance Corporation”, tersedia di <https://dab.gov.af/Afghan-Deposit-Insurance-Corporation>, diakses 6 Oktober 2020.

Apockinas, Dmitrijus, et.al., “A short guide on safeguarding: For Payment and E-Money” Institutions, hlm. 17, tersedia di https://psplab.com/wp-content/uploads/2020/05/A_Short_Guide_on_Safeguarding_for_Payment_and_E_money_Institutions.pdf, diakses 4 November 2020.

Bank Indonesia, “Statistik Sistem Pembayaran”, tersedia di <https://www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/uang-elektronik/contents/jumlah%20uang%20elektronik.aspx>, diakses 14 Agustus 2020. Lembaga Penjamin Simpanan, “Sejarah Pendirian LPS”, tersedia di <https://www.lps.go.id/sejarah>, diakses 14 November 2020.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992, jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, (LN. No. 182, Tahun 1998, TLN. No. 3790).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (LN. No. 22, Tahun 1999, TLN. No. 3821).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, (LN. No. 7 Tahun 2004, TLN. No. 4357).

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, (LN. No. 168 Tahun 1999, TLN. No. 3889)

Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, (LN. No. 96 Tahun 2004, TLN. No. 4420).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (LN. No. 131 Tahun 2004, TLN. No. 4443).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (LN. No. 106 Tahun 2007, TLN. No. 4756).

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, (LN. No. 52, Tahun 1999, TLN. No. 3831).

Peraturan Lembaga Penjaminan Simpanan Nomor 2/PLPS/2010, (BLN. No. 97, Tahun 2010).

Peraturan Bank Indonesia No. 14/17/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan (*Trust*), (LN. No. 260 Tahun 2012, TLN. No. 5368).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/ 1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, (LN. No. 10 Tahun 2014, TLN. No. 5498).

Peraturan mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/06/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, (LN. No. 70 tahun 2018, TLN. No. 6203).

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP Tanggal 22 Juli 2014 tentang Perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (*Electronic Money*).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA LAIN

Afghanistan

Afghanistan Electronic Money Institutions Regulation

Kenya

The National Payment System Regulations 2014.

Amerika

General Counsel's Opinion No. 8 (GC8) 1996.

Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) Stored Value Cards and Other Nontraditional Access Mechanisms New General Counsel's Opinion No. 8. 13 November 2008.

European Union

European Union Payment Services Directive No. 2015/23/2366/EU.

LAIN-LAIN

Martin Lau, "State Reconstruction and International Engagement in Afghanistan", dipresentasikan pada 30 Mei-1 Juni 2003 di London School of Economics and Political Science dan University of Bonn, tersedia di <http://eprints.lse.ac.uk/id/eprint/28366>, diakses 29 Oktober 2020.

Tan Kamello, "Karakter Hukum Perdata Dalam Fungsi Perbankan Melalui Hubungan Antara Bank dengan Nasabah", Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2 September 2006, dalam Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wawancara dengan Dr. Siti Anisa, S.H., M.Hum., Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, pada tanggal 9 November 2020.

Wawancara dengan Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum., Guru Besar Hukum Acara Perdata di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, pada 11 November 2020.

Wawancara dengan Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum. pada hari rabu tanggal 16 November 2020.